



**PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG**



# **RENCANA STRATEGIS**

**SEKRETARIAT DPRD  
KOTA SINGKAWANG**

**TAHUN 2025 -2029**

**(RANKHIR)**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin-Nya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Semoga atas izin-Nya pula Renstra Ini dapat mengantarkan Sekretariat DPRD Kota Singkawang menjadi perangkat daerah yang terpercaya, Renstra ini disusun Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045 serta Visi Misi Wali Kota.

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan/perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Renstra Sekretariat DPRD dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.



Singkawang, Agustus 2025  
Plt. Sekretaris DPRD Kota

  
**HENDRA, SH**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690816 199212 1 001

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	5
<b>PENDAHULUAN</b> .....	5
1. <b>LATAR BELAKANG</b> .....	5
2. <b>DASAR HUKUM</b> .....	6
3. <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	8
4. <b>SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	11
1. <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	11
a. <b>Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah</b> .....	11
b. <b>Sumber Daya Perangkat Daerah</b> .....	20
c. <b>Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	21
d. <b>Kelompok Sasaran Layanan</b> .....	27
2. <b>PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	29
a. <b>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	29
b. <b>Isu Strategis</b> .....	30
<b>BAB III</b> .....	35
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	35
1. <b>TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029</b> .....	35
2. <b>SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029</b> .....	35
3. <b>STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029</b> .....	36
4. <b>ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029</b> .....	37
<b>BAB IV</b> .....	40
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	40
1. <b>URAIAN PROGRAM</b> .....	40
2. <b>URAIAN KEGIATAN</b> .....	42
3. <b>URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF</b> .....	53

<b>4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITYAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>66</b>
<b>5. TARGET Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>68</b>
<b>6. TARGET KINERJA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>1. KESIMPULAN.....</b>	<b>70</b>
<b>2. KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>72</b>
<b>3. PELAKSANAAN PENGENDALIAN dan EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. 2 (T-C.24) Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dprd Kota Singkawang</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 2. 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Dprd Kota Singkawang</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4. 1 Uraian Program Sekretariat DPRD</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4. 3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Singkawang</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan di Kota Singkawang, maka Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang menjadi pedoman dan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. Renstra Sekretariat DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Sekretariat DPRD dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat DPRD, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra

Perubahan Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD.

## **2. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
- 17) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
- 18) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2025-2029 dimaksudkan :

- 1) Merupakan penjabaran secara operasional tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun.
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
- 3) Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2025-2029 ini antara lain :

- 1) Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029;
- 2) Untuk pedoman cara kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;

- 3) Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Singkawang berikutnya.

## **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan yang melatar belakangi penyusunan Renstra, diikuti dengan maksud dan tujuan, serta dasar-dasar kebijakan yang melandasinya. Kaitan dengan dokumen perencanaan lain juga disajikan, berikut sistematika penulisan. Secara urut diatur dalam subbab 1. Latar Belakang, 2. Landasan Hukum, 3. Maksud dan Tujuan dan 4. Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menggambarkan tentang kondisi umum Sekretariat DPRD Kota Singkawang berkenaan dengan struktur lembaga, tugas pokok dan fungsi serta keadaan personil serat Permasalahan dan Isu Strategis Dekretariat DPR Kota Singkawang. Lengkapnya bagian ini terdiri dari subbab 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan 2. Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, maka berkenaan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara khusus dijabarkan dalam subbab 1. Tujuan Renstra Sekretariat Dprd Kota Singkawang Tahun 2025-2029, 2. Sasaran Renstra Sekretariat Dprd Kota Singkawang Tahun 2025-2029, Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Dprd Kota Singkawang Tahun 2025-2029 Dan Arah Kebijakan Sekretariat Dprd Kota Singkawang Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini menyampaikan program dan kegiatan prioritas selama kurun waktu lima tahun terhitung mulai tahun 2025 hingga tahun 2029, sebagai tindakan nyata yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dijelaskan pula Target kinerja Perangkat Daerah sebagai parameter yang digunakan dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada kelanjutannya parameter tersebut menjadi bagian bahan evaluasi kinerja lembaga, sehingga pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan perubahannya dapat dilakukan dengan tepat, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : 1. Uraian Program, 2. Uraian Kegiatan, 3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif, 4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, 5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah dan 6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan atas substansi utama Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disertai dengan kaidah pelaksanaan berisi catatan-catatan harapan lembaga atas keberhasilan pelaksanaan Renstra ini serta Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah**

##### **1) Tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Sekretariat DPRD Kota Singkawang memiliki Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Kota Singkawang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2) Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **3) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang terdiri dari:

- a) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan DPRD;
- 2) penetapan sasaran strategis kesekretariatan DPRD;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan DPRD;
- 4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

b) Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan Keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan bagian umum dan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan mengoordinasikan Sub Bagian dan Kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - ◇ penyusunan rencana kerja bidang program dan keuangan;
  - ◇ penyelenggaraan kegiatan bidang program dan keuangan;
  - ◇ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang program dan keuangan;
  - ◇ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang program dan keuangan; dan
  - ◇ pelaksanaan tugas lain bidang program dan keuangan yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - ◇ penyusunan rencana kerja bidang tata usaha dan kepegawaian;
  - ◇ penyelenggaraan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian;
  - ◇ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha dan kepegawaian;
  - ◇ pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata usaha dan kepegawaian; dan

- ◊ pelaksanaan tugas lain bidang tata usaha dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Rumah Tangga. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga mempunyai fungsi :
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang Rumah Tangga;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang Rumah Tangga;
  - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Rumah Tangga;
  - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rumah Tangga; dan
  - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang Rumah Tangga yang diberikan oleh Kepala Bagian.

c) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian ini mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kajian perundangundangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;

- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian perundangundangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi
- 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kajian perundangundangan,
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan Fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- Kelompok Sub-substansi Kajian Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang kajian perundang-undangan;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang kajian perundang-undangan;
  - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kajian perundangundangan;
  - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kajian perundang-undangan; dan
  - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang kajian perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala Bagian
- Kelompok Sub-substansi Persidangan dan Risalah, mempunyai uraian tugas:
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang persidangan dan risalah;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang persidangan dan risalah;
  - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang persidangan dan risalah;
  - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang persidangan dan risalah; dan
  - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang persidangan dan risalah yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- Kelompok Sub-substansi Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai uraian fungsi:

- ◇ penyusunan rencana kerja bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◇ penyelenggaraan kegiatan bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◇ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◇ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi; dan
- ◇ pelaksanaan tugas lain bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi yang diberikan oleh Kepala Bagian.

d) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;
- 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- Kelompok sub-substansi fasilitasi penganggaran, mempunyai fungsi:
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang fasilitasi penganggaran;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran;
  - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi penganggaran;
  - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi penganggaran; dan
  - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang fasilitasi penganggaran yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- Kelompok Sub-substansi fasilitasi pengawasan, mempunyai fungsi:
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang fasilitasi pengawasan;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan;
  - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi pengawasan;
  - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi pengawasan; dan
  - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang fasilitasi pengawasan yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- Kelompok Sub-substansi Kerja Sama dan Aspirasi, mempunyai fungsi:
  - ◊ penyusunan rencana kerja bidang kerjasama dan aspirasi;
  - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang kerjasama dan aspirasi;

- ◇ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan aspirasi;
  - ◇ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kerjasama dan aspirasi; dan pelaksanaan tugas lain bidang kerjasama dan aspirasi yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu sesuai bidang keahlian dan keterampilannya dan dikoordinir oleh pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



## b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Singkawang saat ini didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS tersebut dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 11 orang.

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S3	-
2.	Pasca Sarjana / S2	-
3.	Sarjana / S1	12 orang
4.	Sarjana Muda / D3	4 orang
5.	SLTA	12 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	7 orang
2.	Golongan III	11 orang
3.	Golongan IV	3 orang
4.	PPPK Golongan IX	2 orang
5.	PPPK Golongan VII	1 orang
6.	PPPK Golongan V	4 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>28 orang</b>

No	Diklat Penjejanan	Jumlah
1.	Diklatpim II	-
2.	SPAMEN	-
3.	Diklatpim III/ Spama	2
4.	Diklatpim IV	-
5.	Adum / Adumla	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2 orang</b>

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>5 orang</b>

### c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan unit kerja yang berperan strategis sebagai unsur pendukung dan koordinator dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Pelayanan tersebut mencakup aspek administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD diukur melalui *Indeks Pelayanan DPRD*, yang menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat. Indeks ini sekaligus mencerminkan tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat secara keseluruhan.

Namun, dalam periode Renstra sebelumnya, capaian Indeks Pelayanan DPRD menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan masih memerlukan peningkatan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh

karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat dan menyempurnakan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang ke depan, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

**Tabel 2. 1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Set-DPRD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pelayanan DPRD (IKM)		N/A	N/A	N/A	90	91	N/A	N/A	N/A	80	82,5 1	N/A	N/A	N/A	89%	91%

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang juga dapat dikenali dari serapan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Singkawang selama periode Renstra Perubahan 2023-2026. Serapan anggaran tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang 2020 - 2024 berikut.

**Tabel 2. 2 (T-C.24) Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dprd Kota Singkawang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	12.389.910.200	18.625.812.050	-	-	-	9.891.065.621	14.498.130.116	-	-	-	80%	78%	50%	47%
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	2.669.915.200	4.113.700.298	-	-	-	1.236.299.003	2.360.162.965	-	-	-	46%	57%	54%	91%
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	2.063.606.000	3.569.112.720	-	-	-	1.675.881.746	2.620.620.087	-	-	-	81%	73%	73%	56%
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	534.557.500	602.063.372	-	-	-	344.188.665	499.836.809	-	-	-	64%	83%	13%	45%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	2.019.961.800	1.698.801.480	-	-	-	1.006.256.273	1.229.750.347	-	-	-	50%	72%	-16%	22%
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	754.557.900	597.536.300	-	-	-	745.883.350	550.989.154	-	-	-	99%	92%	-21%	-26%
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	-	47.311.800	137.961.060	-	-	-	63.352.000	131.002.190	-	-	-	134%	95%	192%	107%
Kegiatan	-	-	-	4.300.000.000	7.906.636.820	-	-	-	4.819.204.590	7.105.768.564	-	-	-	112%	90%	84%	47%

Fasilitasi Tugas DPRD																	
<b>PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	<b>24.688.196.063</b>	<b>27.775.074.756</b>	-	-	-	<b>21.325.802.469</b>	<b>21.637.312.156</b>	-	-	-	<b>86%</b>	<b>78%</b>	<b>13%</b>	<b>1%</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	133.388.100	149.934.606	-	-	-	118.332.265	116.924.400	-	-	-	<b>89%</b>	<b>78%</b>	<b>12%</b>	<b>-1%</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.079.600.592	2.691.930.192	-	-	-	2.618.746.655	2.523.272.452	-	-	-	<b>85%</b>	<b>94%</b>	<b>-13%</b>	<b>-4%</b>
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	64.982.800	45.556.780	-	-	-	51.296.100	35.153.625	-	-	-	<b>79%</b>	<b>77%</b>	<b>-30%</b>	<b>-31%</b>
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	201.060.900	180.584.000	-	-	-	125.453.935	115.726.115	-	-	-	<b>62%</b>	<b>64%</b>	<b>-10%</b>	<b>-8%</b>
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	510.692.500	365.473.142	-	-	-	435.906.999	308.503.671	-	-	-	<b>85%</b>	<b>84%</b>	<b>-28%</b>	<b>-29%</b>
Kegiatan Pengadaan	-	-	-	804.468.400	3.357.333.400	-	-	-	746.984.948	1.207.865.000	-	-	-	<b>93%</b>	<b>36%</b>	<b>317%</b>	<b>62%</b>

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.741.031.990	1.923.389.371	-	-	-	1.531.238.478	1.576.616.889	-	-	-	88%	82%	10%	3%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	304.844.966	305.386.970	-	-	-	263.650.222	205.251.176	-	-	-	86%	67%	0%	-22%
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	17.501.325.315	18.400.197.515	-	-	-	15.246.157.400	15.275.210.943	-	-	-	86%	83%	4%	0%
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	104.753.300	355.288.780	-	-	-	188.035.467	272.767.885	-	-	-	180%	77%	239%	45%

#### **d. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Singkawang, Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada berbagai kelompok sasaran yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelompok sasaran layanan ini terdiri dari beberapa pihak yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan dan implementasi keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh DPRD. Adapun kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota DPRD Kota Singkawang  
Anggota DPRD merupakan pengguna utama dari layanan yang disediakan oleh Sekretariat DPRD. Layanan yang diberikan kepada anggota DPRD meliputi:
  - a) Fasilitas administrasi dan dokumentasi: Penyediaan berbagai dokumen penting seperti bahan rapat, notulen, laporan, serta data pendukung lainnya.
  - b) Fasilitas perjalanan dinas: Pengaturan perjalanan dinas, akomodasi, dan transportasi untuk melaksanakan tugas kedewanan di luar daerah maupun dalam daerah.
  - c) Peningkatan kapasitas: Organisasi pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan Kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas legislatif dan pengawasan.
- 2) Pimpinan DPRD Kota Singkawang  
Pimpinan DPRD, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, memiliki kebutuhan khusus yang berhubungan dengan koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. Sekretariat DPRD menyediakan layanan berupa:
  - a) Pendampingan administrasi dan koordinasi rapat: Menyusun dan menyediakan agenda rapat, bahan presentasi, serta notulen hasil rapat.
  - b) Fasilitas perjalanan dinas: Pengaturan perjalanan dinas, akomodasi, dan transportasi untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD di luar daerah maupun dalam daerah.
  - c) Layanan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif: Membantu pimpinan DPRD dalam berkomunikasi dengan pemerintah kota dan lembaga lainnya dalam rangka pengambilan keputusan bersama.
- 3) Komisi-Komisi DPRD Kota Singkawang  
Komisi-komisi di DPRD memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekretariat DPRD memberikan layanan sebagai berikut:

- a) Penyediaan data dan informasi teknis: Membantu komisi dalam mendapatkan informasi dan data terkait isu yang sedang dibahas, termasuk hasil evaluasi anggaran dan kebijakan daerah.
  - b) Fasilitas rapat dan koordinasi antar-komisi: Menyediakan tempat dan fasilitas untuk rapat komisi, serta membantu dalam pengorganisasian koordinasi antara komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Singkawang.
- 4) Pemerintah Kota Singkawang  
Sekretariat DPRD juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Layanan yang diberikan meliputi:
- a) Fasilitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kota: Menyediakan ruang untuk dialog dan koordinasi antara kedua pihak dalam merumuskan kebijakan bersama.
  - b) Koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda): Membantu proses administrasi dalam pembahasan Raperda yang disusun oleh Pemerintah Kota dan DPRD.
- 5) Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat DPRD memberikan akses informasi kepada masyarakat dan LSM mengenai kegiatan DPRD. Layanan yang diberikan meliputi:
- a) Penyediaan informasi publik: Menyediakan saluran informasi mengenai kegiatan legislatif, hasil rapat, serta laporan kegiatan DPRD yang dapat diakses oleh masyarakat.
  - b) Penyampaian aspirasi masyarakat: Memfasilitasi penerimaan aspirasi masyarakat dalam bentuk surat, reses, atau pertemuan langsung dengan anggota DPRD.
- 6) Instansi dan Lembaga Pemerintah Lainnya  
Instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam kegiatan legislatif dan pemerintahan daerah juga menjadi kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD. Layanan yang diberikan meliputi:
- a) Fasilitas koordinasi antarinstansi: Memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antarinstansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  - b) Penyediaan data teknis untuk analisis kebijakan: Menyediakan data teknis dan laporan yang dibutuhkan oleh instansi terkait dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.

## 2. PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi serta Lingkungan eksternal organisasi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian Penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk melangkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang untuk menentukan Isu strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Masalah Pokok

“Belum Optimalnya tingkat Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD”

#### 2) Masalah

“Belum Optimalnya Dukungan Palayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD”

#### 3) Akar Masalah

Permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa akar masalah diantaranya:

- a) Belum Optimalnya Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat DPRD
- b) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi perkantoran berbasis teknologi.

- c) Beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Sekretariat DPRD.
- d) Keterbatasan dan ketimpangan kompetensi SDM Sekretariat DPRD.
- e) Keterbatasan Anggaran dan Belum tersedia regulasi teknis yang mengatur secara komprehensif mekanisme perekrutan, pelaporan, dan evaluasi tenaga ahli DPRD.
- f) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
- g) Belum Optimalnya Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Sekretariat DPRD

## **b. Isu Strategis**

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dilakukan Analisis SWOT, Analisis SWOT ini mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan internal Sekretariat DPRD, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan yang ada, Sekretariat DPRD Kota Singkawang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Analisis SWOT yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

### 1) Kekuatan ( Strengths)

- a) Kedudukan dan Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang telah tersedia dan memiliki dasar hukum jelas Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas DPRD .

- b) Adanya Sarana kerja dan Dukungan administratif Sekretariat DPRD yang telah diatur oleh regulasi dan berjalan secara rutin.
  - c) Anggaran operasional yang tersedia secara periodik melalui APBD.
  - d) Tersedianya Tata Tertib DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
  - e) Sumber daya manusia yang sudah ada berpengalaman dalam mendukung tugas-tugas kedewanan meskipun terbatas.
  - f) Adanya kesempatan untuk pengembangan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
  - g) Potensi untuk bekerja sama dengan pihak eksternal (akademisi, lembaga riset) guna memperkuat fungsi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
  - h) Ketersediaan Sarpras penunjang kerja dan ifrastruktur teknologi dasar sebagai fondasi awal transformasi digital
  - i) Adanya hubungan kerja yang baik yang terjalin antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD.
- 2) Kelemahan (Weaknessess)
- a) Masih terdapat keterbatasan dan ketimpangan kompetensi SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang
  - b) Beban kerja yang tinggi dan kapasitas SDM yang terbatas.
  - c) Regulasi dan Anggaran yang terbatas menghambat Sekretariat DPRD untuk mempekerjakan tenaga ahli yang cukup sesuai dengan kebutuhan, serta pengelolaan dan evaluasi tenaga ahli yang masih minim.
  - d) Keterbatasan Sarana dan prasarana yang menunjang kerja berbasis digital dalam mendukung pelayanan tugas DPRD.
  - e) Kurangnya budaya kerja adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis.
  - f) Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang belum optimal.
- 3) Peluang (Opportunitis)
- a) Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang

- b) Dukungan regulasi untuk transformasi digital dalam mendukung sistem kerja digital.
  - c) Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan pihak ketiga dalam penyediaan kajian teknis dan tenaga ahli.
  - d) Teknologi informasi semakin mudah diakses dan diintegrasikan ke dalam sistem layanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
  - e) Dukungan kebijakan nasional dan daerah dalam reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.
  - f) Adanya anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, peremajaan sarana prasarana serta peningkatan SDM Sekretariat DPRD.
- 4) Ancaman (Threats)
- a) Tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas, sementara birokrasi belum sepenuhnya responsif.
  - b) Keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi pengembangan SDM dan sarana prasarana.
  - c) Pegawai Sekretariat DPRD mungkin tidak siap untuk perubahan, baik dalam budaya kerja maupun adaptasi teknologi, yang dapat menghambat transformasi yang diperlukan.
  - d) Ketidaksiharasan antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas kerja dan penyusunan program-program yang dibutuhkan oleh DPRD
  - e) Tantangan dari sektor eksternal seperti perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Disusunlah Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang di antaranya:

- a) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- b) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara Terstruktur dan Berkelanjutan
- c) Percepatan Transformasi Digital dan Budaya Kerja Adaptif di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang

- d) Penguatan Literasi Regulasi dan Pemahaman Pedoman Teknis bagi Seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- e) Peremajaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja untuk Mendukung Produktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- f) Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- g) Penyederhanaan dan melakukan inovasi pada Prosedur dan Penataan Layanan Internal untuk Mendukung Kecepatan Layanan kepada DPRD
- h) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
- i) Penyediaan Tenaga Ahli

Berdasarkan Isu-Isu strategis di atas maka di tentukan misi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dalam upaya keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD, yaitu :

- 1) Meningkatkan efisiensi tata kelola Administrasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- 2) Meningkatkan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- 3) Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid
- 4) Mengoptimalkan penggunaan Teknologi dalam layanan Administrasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang
- 5) Menyediakan pelayanan yang secara tepat waktu dan responsif untuk pemenuhan kebutuhan anggota DPRD
- 6) Mengadakan Bimbingan Teknis Berkelanjutan guna Peningkatan Kapasitas anggota DPRD

7) Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Transparan

**Tabel 2. 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD		ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU STRATEGIS PD
	MASALAH	AKAR MASALAH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Infrastruktur teknologi informasi yang berkembang	Belum Optimalnya Dukungan Palayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD (nilai SKM Sekretariat DPRD yang masih belum optimal)	Belum Optimalnya Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat DPRD	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Penilaian SAKIP	Penguatan Pengawasan Akuntabilitas Internal	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Layanan Sekretariat DPRD
		Beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Sekretariat DPRD				Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD secara Terstruktur dan Berkelanjutan
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi perkantoran berbasis teknologi				Percepatan Transformasi Digital dan Budaya Kerja Adaptif
		Keterbatasan Anggaran				Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD				Peremajaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja untuk Mendukung Produktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD
		Belum Optimalnya Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Sekretariat DPRD				Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Kelembagaan Sekretariat DPRD

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **1. TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang telah merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029, Tujuan yang sesuai dengan misi ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Adapun yang menjadi Tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan sasaran dari misi ketiga yaitu *“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”*.

### **2. SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah, *“Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD”*. Berdasarkan

uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara lebih ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>		<i>Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD</i>	83.51	84.51	85.51	86.51	87.51	88.51
1		<i>Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD</i>	<i>Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **3. STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029**

Strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan pendekatan atau cara utama yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Strategi ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi, serta diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga legislatif daerah secara keseluruhan.

Strategi jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang difokuskan pada bagaimana Sekretariat dapat secara optimal memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada pimpinan dan anggota DPRD, sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dapat berjalan

dengan efektif. Strategi ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat.

Dengan strategi yang tepat, Sekretariat DPRD Kota Singkawang diharapkan mampu mencapai target kinerja hasil (outcome) dari program-program prioritas yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi yang dirancang ini juga menjadi dasar untuk menentukan kegiatan dan langkah implementasi yang lebih rinci pada tahap perencanaan tahunan, adapun Strategi Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Standarisasi layanan dan melaksanakan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan Berbasis Kinerja, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi.	Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi pegawai Sekretariat DPRD secara terstruktur	Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, mendukung digitalisasi proses kerja, serta mengotomatisasi layanan administratif demi efektivitas dan efisiensi dukungan kepada DPRD.	Meningkatkan sinergi antar unit kerja di Sekretariat DPRD serta menjalin kerja sama strategis dengan OPD/instansi lain guna memperkuat dukungan terhadap fungsi DPRD.	Meningkatkan Kapasitas DPRD dan kompetensi DPRD secara terstruktur serta menyediakan tenaga ahli profesional yang sesuai dengan kebutuhan kerja DPRD

#### **4. ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029**

Arah kebijakan merupakan pedoman umum atau rambu-rambu pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Arah kebijakan berperan sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, serta menjadi kerangka kerja dalam pengambilan keputusan pada tataran operasional.

Arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang disusun agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendukung perwujudan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kebijakan yang diambil merupakan kumpulan keputusan yang ditetapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Setiap arah kebijakan juga didukung oleh tolok ukur keberhasilan yang jelas, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi. Melalui evaluasi tersebut, Sekretariat DPRD dapat menentukan kebijakan lanjutan yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan aktual di lingkungan DPRD maupun Pemerintah Kota Singkawang, adapun Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	-	Menyusun kebijakan untuk mempercepat adopsi teknologi dalam pemerintahan dan layanan publik, guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan Memperkuat partisipasi masyarakat	<p>1. Penguatan Kapasitas SDM dan Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten. Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pemetaan kompetensi, fasilitasi pelatihan teknis, serta penyediaan tenaga ahli di bidang strategis untuk mendukung tugas Anggota DPRD.</p> <p>2. Digitalisasi Layanan dan Modernisasi Proses Administratif. Mewujudkan sistem kerja berbasis teknologi dengan membangun infrastruktur TI yang aman, mengimplementasikan digitalisasi layanan, serta</p>	

		dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara adil dan merata.	mengotomatisasi proses administratif untuk meningkatkan efisiensi.	
			3. Penyederhanaan Prosedur dan Standarisasi Layanan. Melakukan identifikasi dan penyederhanaan prosedur yang tidak efisien serta menyusun dan menerapkan SOP sebagai standar baku layanan yang dapat dievaluasi secara berkala.	
			4. Penguatan Koordinasi Internal dan Tata Kelola Informasi. Meningkatkan komunikasi lintas unit melalui pembentukan forum koordinasi rutin, pelaporan kinerja antar bagian, dan sistem pelaporan informasi yang terintegrasi.	
			5. Kolaborasi Eksternal dan Transparansi Layanan. Membangun kerja sama strategis dengan OPD dan instansi lain serta mempublikasikan informasi kinerja dan layanan Sekretariat DPRD secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan.	

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **1. URAIAN PROGRAM**

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Tabel 4. 1 Uraian Program Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(	(	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					41.008.020.992,00		42.300.905.247,00		43.329.815.712,00		47.263.522.294,00		48.763.522.294,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.949.148.692,00		27.137.546.328,00		27.720.683.761,00		28.649.297.743,00		32.858.878.405,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61.25	62.25	63.25	26.949.148.692,00	64.25	27.137.546.328,00	65.25	27.720.683.761,00	66.25	28.649.297.743,00	67.25	32.858.878.405,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.058.872.300,00		15.163.358.919,00		15.609.131.951,00		18.614.224.551,00		15.904.643.889,00	
Meningkatnya Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	14.058.872.300,00	100	15.163.358.919,00	100	15.609.131.951,00	100	18.614.224.551,00	100	15.904.643.889,00	SEKRETARIAT DPRD
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100
TOTAL KESELURUHAN					41.008.020.992,00		42.300.905.247,00		43.329.815.712,00		47.263.522.294,00		48.763.522.294,00	

## 2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

**Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD</b>							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
					Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Terpenuhinya Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

				Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.02.01.2.03 - Administrasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan	Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan	Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05 - Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.02.01.2.05 - Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.02.01.2.05 - Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.02.01.2.05 - Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.02.01.2.05 - Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Peraturan Perundang-Undangan		
			Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				PJuemrizlainhaKnennyadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	

				yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
		Meningkatnya Fasilitasi Dukungan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
	Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	

				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	

				Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.02.2.03.0008 -Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04.0007 -Penyusunan Program Kerja DPRD
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD
				Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses

			Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
				Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

### 3. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Subkegiatan merujuk pada bagian atau aktivitas yang lebih kecil dan terperinci yang merupakan bagian dari sebuah kegiatan utama dalam suatu program. Berikut secara rinci dijabarkan mengenai setiap subkegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota SIngkawang, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif yang disediakan untuk masing-masing subkegiatan

Tabel 4. 3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				41.008.020.992,00		42.300.905.247,00		43.329.815.712,00		47.263.522.294,00		48.763.522.294,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.949.148.692,00		27.137.546.328,00		27.720.683.761,00		28.649.297.743,00		32.858.878.405,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61.25	63.25	26.949.148.692,00	64.25	27.137.546.328,00	65.25	27.720.683.761,00	66.25	28.649.297.743,00	67.25	32.858.878.405,00	4.02.0.00.0.00.01. 00 - SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.156.500,00		128.981.518,00		130.185.620,00		131.233.452,00		129.132.320,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	94.156.500,00	1	128.981.518,00	1	130.185.620,00	1	131.233.452,00	1	129.132.320,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.406.200,00		9.338.175,00		9.338.175,00		9.338.175,00		9.338.175,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	10.406.200,00	2	9.338.175,00	2	9.338.175,00	2	9.338.175,00	2	9.338.175,00		
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				27.164.400,00		32.345.874,00		32.345.874,00		32.345.874,00		32.345.874,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	27.164.400,00	1	32.345.874,00	1	32.345.874,00	1	32.345.874,00	1	32.345.874,00		
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				22.290.800,00		26.468.145,00		26.468.145,00		26.468.145,00		26.468.145,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	22.290.800,00	1	26.468.145,00	1	26.468.145,00	1	26.468.145,00	1	26.468.145,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.931.000,00		20.225.304,00		20.225.304,00		20.225.304,00		20.225.304,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	9.931.000,00	1	20.225.304,00	1	20.225.304,00	1	20.225.304,00	1	20.225.304,00		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				9.073.500,00		14.468.454,00		14.468.454,00		14.468.454,00		14.468.454,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	9.073.500,00	1	14.468.454,00	1	14.468.454,00	1	14.468.454,00	1	14.468.454,00		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.290.600,00		17.481.106,00		18.286.485,00		18.987.341,00		17.581.972,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	15.290.600,00	4	17.481.106,00	4	18.286.485,00	4	18.987.341,00	4	17.581.972,00		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		8.654.460,00		9.053.183,00		9.400.159,00		8.704.396,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	-	4	8.654.460,00	4	9.053.183,00	4	9.400.159,00	4	8.704.396,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.554.186.217,00		4.492.448.233,00		5.028.518.191,00		4.863.075.464,00		5.463.934.660,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	500	3.554.186.217,00	500	4.492.448.233,00	500	5.028.518.191,00	500	4.863.075.464,00	500	5.463.934.660,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	28		28		28		28		28			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.274.957.117,00		4.219.538.626,00		4.748.449.091,00		4.582.155.673,00		5.182.155.673,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	28	3.274.957.117,00	28	4.219.538.626,00	28	4.748.449.091,00	28	4.582.155.673,00	28	5.182.155.673,00		
4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				194.160.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	194.160.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00		
4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39.371.800,00		37.254.146,00		39.371.800,00		39.765.518,00		40.163.173,00		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	500	39.371.800,00	500	37.254.146,00	500	39.371.800,00	500	39.765.518,00	500	40.163.173,00		
4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				22.630.600,00		19.391.970,00		22.630.600,00		22.856.906,00		23.085.475,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	48	22.630.600,00	48	19.391.970,00	48	22.630.600,00	48	22.856.906,00	48	23.085.475,00		
4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.508.500,00		8.068.591,00		9.508.500,00		9.603.585,00		9.699.620,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	9.508.500,00	1	8.068.591,00	1	9.508.500,00	1	9.603.585,00	1	9.699.620,00		
4.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				13.558.200,00		13.194.900,00		13.558.200,00		13.693.782,00		13.830.719,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	13.558.200,00	2	13.194.900,00	2	13.558.200,00	2	13.693.782,00	2	13.830.719,00		
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				60.670.300,00		53.448.206,00		55.910.641,00		58.053.497,00		53.756.603,00		
Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	60.670.300,00	2	53.448.206,00	2	55.910.641,00	2	58.053.497,00	2	53.756.603,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	2		2		2		2		2			
4.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				13.056.300,00		11.286.274,00		11.806.249,00		12.258.740,00		11.351.396,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	2	13.056.300,00	2	11.286.274,00	2	11.806.249,00	2	12.258.740,00	2	11.351.396,00		
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				47.614.000,00		42.161.932,00		44.104.392,00		45.794.757,00		42.405.207,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	47.614.000,00	2	42.161.932,00	2	44.104.392,00	2	45.794.757,00	2	42.405.207,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				149.847.500,00		136.683.709,00		142.980.924,00		148.460.871,00		178.472.376,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	149.847.500,00	0	136.683.709,00	0	142.980.924,00	0	148.460.871,00	0	178.472.376,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	10		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0		28		28		28		28			
4.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				7.775.500,00		-		-		-		-		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	7.775.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				29.000.000,00		36.342.164,00		38.016.500,00		39.473.536,00		36.551.859,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	29.000.000,00	1	36.342.164,00	1	38.016.500,00	1	39.473.536,00	1	36.551.859,00		
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		4.370.537,00		4.571.894,00		4.747.118,00		4.395.755,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	28	4.370.537,00	28	4.571.894,00	28	4.747.118,00	28	4.395.755,00		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		47.985.504,00		50.196.265,00		52.120.108,00		68.762.381,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	6	47.985.504,00	6	50.196.265,00	6	52.120.108,00	6	68.762.381,00		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				113.072.000,00		47.985.504,00		50.196.265,00		52.120.109,00		68.762.381,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	10	113.072.000,00	6	47.985.504,00	6	50.196.265,00	6	52.120.109,00	6	68.762.381,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				561.699.200,00		540.561.948,00		553.347.304,00		572.206.995,00		572.206.995,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	14	561.699.200,00	14	540.561.948,00	14	553.347.304,00	14	572.206.995,00	14	572.206.995,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20		20		20		20		20			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.176.900,00		36.142.339,00		37.807.468,00		39.256.494,00		39.256.494,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	42.176.900,00	4	36.142.339,00	4	37.807.468,00	4	39.256.494,00	4	39.256.494,00		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.746.000,00		163.848.777,00		171.397.525,00		177.966.581,00		177.966.581,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20	190.746.000,00	20	163.848.777,00	20	171.397.525,00	20	177.966.581,00	20	177.966.581,00		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.524.400,00		12.673.649,00		13.257.542,00		13.765.656,00		13.765.656,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	14	9.524.400,00	14	12.673.649,00	14	13.257.542,00	14	13.765.656,00	14	13.765.656,00		

KODING URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				139.228.600,00		118.875.772,00		124.352.549,00		129.118.538,00		129.118.538,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	8	139.228.600,00	8	118.875.772,00	8	124.352.549,00	8	129.118.538,00	8	129.118.538,00		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				62.720.000,00		65.808.691,00		68.840.592,00		71.479.006,00		71.479.006,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11	16	62.720.000,00	16	65.808.691,00	16	68.840.592,00	16	71.479.006,00	16	71.479.006,00		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.303.300,00		14.680.120,00		15.356.454,00		15.945.012,00		15.945.012,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	17.303.300,00	12	14.680.120,00	12	15.356.454,00	12	15.945.012,00	12	15.945.012,00		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		128.532.600,00		122.335.174,00		124.675.708,00		124.675.708,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.000.000,00	12	128.532.600,00	12	122.335.174,00	12	124.675.708,00	12	124.675.708,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.940.342.800,00		968.088.793,00		964.444.908,00		1.041.569.924,00		5.114.628.492,00		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	1.940.342.800,00	0	968.088.793,00	0	964.444.908,00	0	1.041.569.924,00	3	5.114.628.492,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	298		214		70		40		218			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		10		10		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75	108		27		34		28		71			
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		4.200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3	4.200.000.000,00		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		318.694.904,00		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	-	0	-	0	-	1	318.694.904,00	0	-		
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				731.862.300,00		358.230.452,00		285.188.763,00		147.190.781,00		416.755.816,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	298	731.862.300,00	214	358.230.452,00	70	285.188.763,00	40	147.190.781,00	218	416.755.816,00		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		129.817.926,00		135.798.823,00		-		-		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	10	129.817.926,00	10	135.798.823,00	0	-	0	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.208.480.500,00		480.040.415,00		543.457.322,00		575.684.239,00		497.872.676,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75	108	1.208.480.500,00	27	480.040.415,00	34	543.457.322,00	28	575.684.239,00	71	497.872.676,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.033.949.680,00		2.048.811.354,00		2.049.214.068,00		2.049.564.517,00		2.048.861.790,00		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	2.033.949.680,00	12	2.048.811.354,00	12	2.049.214.068,00	12	2.049.564.517,00	12	2.048.861.790,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	48		48		48		48		48			
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				409.064.680,00		417.805.754,00		418.208.468,00		418.558.917,00		417.856.190,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	409.064.680,00	48	417.805.754,00	48	418.208.468,00	48	418.558.917,00	48	417.856.190,00		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		6.120.600,00		6.120.600,00		6.120.600,00		6.120.600,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	12	6.120.600,00	12	6.120.600,00	12	6.120.600,00	12	6.120.600,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.624.885.000,00		1.624.885.000,00		1.624.885.000,00		1.624.885.000,00		1.624.885.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	48	1.624.885.000,00	48	1.624.885.000,00	48	1.624.885.000,00	48	1.624.885.000,00	48	1.624.885.000,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				575.739.880,00		287.481.881,00		296.454.840,00		304.263.270,00		478.883.124,00		
Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	575.739.880,00	3	287.481.881,00	3	296.454.840,00	3	304.263.270,00	3	478.883.124,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	13		19		19		20		20			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	1		1		1		1		4			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106	412		412		412		412		412			

KODING URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.010.000,00		46.010.000,00		46.010.000,00		46.010.000,00		166.781.001,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	1	46.010.000,00	1	46.010.000,00	1	46.010.000,00	1	46.010.000,00	4	166.781.001,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.710.000,00		46.710.000,00		46.710.000,00		46.710.000,00		75.216.461,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	13	46.710.000,00	19	46.710.000,00	19	46.710.000,00	20	46.710.000,00	20	75.216.461,00		
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				13.365.000,00		11.452.255,00		11.979.877,00		12.439.023,00		52.518.335,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	30	13.365.000,00	30	11.452.255,00	30	11.979.877,00	30	12.439.023,00	30	52.518.335,00		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				314.550.000,00		48.409.200,00		50.639.481,00		52.580.312,00		48.688.522,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	314.550.000,00	2	48.409.200,00	2	50.639.481,00	2	52.580.312,00	2	48.688.522,00		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.844.880,00		64.111.116,00		67.064.806,00		69.635.161,00		64.481.038,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	71.844.880,00	3	64.111.116,00	3	67.064.806,00	3	69.635.161,00	3	64.481.038,00		
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				83.260.000,00		70.789.310,00		74.050.676,00		76.888.774,00		71.197.767,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106	412	83.260.000,00	412	70.789.310,00	412	74.050.676,00	412	76.888.774,00	412	71.197.767,00		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				17.851.522.515,00		18.376.716.705,00		18.394.413.887,00		19.009.814.295,00		18.378.933.114,00		
Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	17.851.522.515,00	30	18.376.716.705,00	30	18.394.413.887,00	30	19.009.814.295,00	30	18.378.933.114,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	3		4		3		3		3			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				17.595.825.315,00		17.947.741.821,00		17.947.741.821,00		18.547.741.821,00		17.947.741.821,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30	17.595.825.315,00	30	17.947.741.821,00	30	17.947.741.821,00	30	18.547.741.821,00	30	17.947.741.821,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				210.847.200,00		384.124.884,00		401.822.066,00		417.222.474,00		386.341.293,00		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	3	210.847.200,00	4	384.124.884,00	3	401.822.066,00	3	417.222.474,00	3	386.341.293,00		

KODING URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				44.850.000,00		44.850.000,00		44.850.000,00		44.850.000,00		44.850.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	30	44.850.000,00	30	44.850.000,00	30	44.850.000,00	30	44.850.000,00	30	44.850.000,00		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				127.034.100,00		104.323.981,00		105.213.378,00		471.055.458,00		440.068.931,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	30	127.034.100,00	30	104.323.981,00	30	105.213.378,00	30	471.055.458,00	30	440.068.931,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30	30		30		30		30		30			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				27.816.000,00		19.304.705,00		20.194.101,00		20.968.068,00		19.416.093,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30	30	27.816.000,00	30	19.304.705,00	30	20.194.101,00	30	20.968.068,00	30	19.416.093,00		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				99.218.100,00		85.019.276,00		85.019.277,00		450.087.390,00		420.652.838,00		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30	30	99.218.100,00	30	85.019.276,00	30	85.019.277,00	30	450.087.390,00	30	420.652.838,00		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14.058.872.300,00		15.163.358.919,00		15.609.131.951,00		18.614.224.551,00		15.904.643.889,00		
Meningkatnya Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	14.058.872.300,00	100	15.163.358.919,00	100	15.609.131.951,00	100	18.614.224.551,00	100	15.904.643.889,00	4.02.0.00.0.00.01.00 - SEKRETARIAT DPRD	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.308.153.900,00		3.095.008.700,00		3.678.948.898,00		4.320.238.124,00		3.783.212.106,00		
Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0	3.308.153.900,00	0	3.095.008.700,00	0	3.678.948.898,00	1	4.320.238.124,00	0	3.783.212.106,00		
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				310.541.200,00		310.541.200,00		286.695.876,00		297.683.907,00		439.650.505,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	2	310.541.200,00	2	310.541.200,00	2	286.695.876,00	2	297.683.907,00	2	439.650.505,00		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.577.473.300,00		2.577.473.300,00		3.206.710.991,00		3.329.612.797,00		3.165.167.843,00		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6	2.577.473.300,00	6	2.577.473.300,00	6	3.206.710.991,00	6	3.329.612.797,00	6	3.165.167.843,00		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				213.145.200,00		-		-		-		-		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	1	213.145.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				206.994.200,00		206.994.200,00		185.542.031,00		192.653.196,00		178.393.758,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	1	206.994.200,00	1	206.994.200,00	1	185.542.031,00	1	192.653.196,00	1	178.393.758,00		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				-		-		-		500.288.224,00		-		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0	-	0	-	0	-	1	500.288.224,00	0	-		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				3.184.000.000,00		3.184.000.000,00		3.243.207.556,00		3.366.613.746,00		3.085.151.417,00		
Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	3.184.000.000,00	1	3.184.000.000,00	1	3.243.207.556,00	1	3.366.613.746,00	1	3.085.151.417,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				512.000.000,00		512.000.000,00		544.596.602,00		555.988.409,00		539.026.315,00		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	512.000.000,00	2	512.000.000,00	2	544.596.602,00	2	555.988.409,00	2	539.026.315,00		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				512.000.000,00		512.000.000,00		527.196.602,00		555.988.409,00		539.026.315,00		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	512.000.000,00	2	512.000.000,00	2	527.196.602,00	2	555.988.409,00	2	539.026.315,00		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				720.000.000,00		720.000.000,00		729.721.364,00		757.688.984,00		669.032.929,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	729.721.364,00	1	757.688.984,00	1	669.032.929,00		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				720.000.000,00		720.000.000,00		738.596.234,00		766.903.996,00		669.032.929,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	738.596.234,00	1	766.903.996,00	1	669.032.929,00		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				720.000.000,00		720.000.000,00		703.096.754,00		730.043.948,00		669.032.929,00		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	720.000.000,00	1	720.000.000,00	1	703.096.754,00	1	730.043.948,00	1	669.032.929,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				652.964.800,00		652.964.800,00		776.676.056,00		808.831.329,00		769.579.981,00		
Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	12	652.964.800,00	12	652.964.800,00	12	776.676.056,00	12	808.831.329,00	12	769.579.981,00		
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	12		12		12		12		12			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				14.592.000,00		14.592.000,00		33.341.517,00		35.415.394,00		33.515.684,00		
Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	12	14.592.000,00	12	14.592.000,00	12	33.341.517,00	12	35.415.394,00	12	33.515.684,00		
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				14.411.800,00		14.411.800,00		33.341.517,00		35.415.394,00		33.515.684,00		
Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	12	14.411.800,00	12	14.411.800,00	12	33.341.517,00	12	35.415.394,00	12	33.515.684,00		
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian				14.633.400,00		14.633.400,00		33.341.517,00		35.415.394,00		33.515.684,00		
Terlaksananya Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	12	14.633.400,00	12	14.633.400,00	12	33.341.517,00	12	35.415.394,00	12	33.515.684,00		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				609.327.600,00		609.327.600,00		676.651.505,00		702.585.147,00		669.032.929,00		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	609.327.600,00	1	609.327.600,00	1	676.651.505,00	1	702.585.147,00	1	669.032.929,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				1.770.033.100,00		1.759.687.679,00		1.415.783.598,00		1.876.484.700,00		1.424.998.469,00		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	1.770.033.100,00	0	1.759.687.679,00	0	1.415.783.598,00	1	1.876.484.700,00	0	1.424.998.469,00		
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0	0		0		0		0		8			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	4		4		4		4		4			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				-		-		-		447.200.000,00		-		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	-	0	-	0	-	1	447.200.000,00	0	-		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				1.612.000.000,00		1.612.000.000,00		1.194.671.100,00		1.228.176.818,00		1.137.271.960,00		
Terselenggaranya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	4	1.612.000.000,00	4	1.612.000.000,00	4	1.194.671.100,00	4	1.228.176.818,00	4	1.137.271.960,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				-		-		-		-		83.902.340,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	8	83.902.340,00		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				89.471.000,00		89.471.000,00		160.213.694,00		137.875.044,00		144.852.312,00		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11	4	89.471.000,00	4	89.471.000,00	4	160.213.694,00	4	137.875.044,00	4	144.852.312,00		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				19.343.100,00		16.459.469,00		17.217.780,00		17.877.676,00		16.973.707,00		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	19.343.100,00	1	16.459.469,00	1	17.217.780,00	1	17.877.676,00	1	16.973.707,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				49.219.000,00		41.757.210,00		43.681.024,00		45.355.162,00		41.998.150,00		
Terselenggaranya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0	15	49.219.000,00	15	41.757.210,00	15	43.681.024,00	15	45.355.162,00	15	41.998.150,00		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1.469.430.500,00		1.469.557.792,00		1.470.747.936,00		1.471.783.621,00		1.469.706.846,00		
Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1.469.430.500,00	1	1.469.557.792,00	1	1.470.747.936,00	1	1.471.783.621,00	1	1.469.706.846,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3		3		3		3		3			
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				25.705.300,00		25.832.592,00		27.022.736,00		28.058.421,00		25.981.646,00		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	25.705.300,00	1	25.832.592,00	1	27.022.736,00	1	28.058.421,00	1	25.981.646,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				1.443.725.200,00		1.443.725.200,00		1.443.725.200,00		1.443.725.200,00		1.443.725.200,00		
Terselenggaranya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	1.443.725.200,00	3	1.443.725.200,00	3	1.443.725.200,00	3	1.443.725.200,00	3	1.443.725.200,00		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				-		336.175.337,00		18.285.781,00		496.615.110,00		17.581.296,00		
Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	-	1	336.175.337,00	0	18.285.781,00	1	496.615.110,00	0	17.581.296,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0		1		1		1		1			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				-		318.694.904,00		-		477.628.499,00		-		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	-	1	318.694.904,00	0	-	1	477.628.499,00	0	-		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				-		17.480.433,00		18.285.781,00		18.986.611,00		17.581.296,00		
Terselenggaranya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	-	1	17.480.433,00	1	18.285.781,00	1	18.986.611,00	1	17.581.296,00		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				95.290.000,00		80.574.918,00		80.574.918,00		83.663.067,00		77.470.653,00		
Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100	100	95.290.000,00	100	80.574.918,00	100	80.574.918,00	100	83.663.067,00	100	77.470.653,00		

KIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				95.290.000,00		80.574.918,00		80.574.918,00		83.663.067,00		77.470.653,00		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100	100	95.290.000,00	100	80.574.918,00	100	80.574.918,00	100	83.663.067,00	100	77.470.653,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				3.579.000.000,00		4.585.389.693,00		4.924.907.208,00		6.189.994.854,00		5.276.943.121,00		
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	50	3.579.000.000,00	50	4.585.389.693,00	50	4.924.907.208,00	50	6.189.994.854,00	50	5.276.943.121,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	75	75		75		75		75		75			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3.059.000.000,00		4.065.389.693,00		4.404.907.208,00		5.669.994.854,00		4.756.943.121,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	75	75	3.059.000.000,00	75	4.065.389.693,00	75	4.404.907.208,00	75	5.669.994.854,00	75	4.756.943.121,00		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	50	520.000.000,00	50	520.000.000,00	50	520.000.000,00	50	520.000.000,00	50	520.000.000,00		

#### 4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subkegiatan dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, subkegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas dan sarana pendukung bagi anggota DPRD, hingga penguatan kapasitas sekretariat dalam menyediakan layanan administrasi yang efisien.

**Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD</b>				
1.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan	

		Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
		4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
		4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
		4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
		4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
		4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
		4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
		4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
		4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
		4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
		4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
		4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
		4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
		4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
		4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan	
		4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
		4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi	
		4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan	
		4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	

## 5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Singkawang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	82,51	83,51	84,51	85,51	86,51	87,51	88,51	

## **6. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029, target kinerja akan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan fokus tugas setiap perangkat daerah. Namun, untuk Sekretariat DPRD Kota Singkawang, pada periode perencanaan ini tidak terdapat penetapan IKK secara spesifik (Nihil). Hal ini disebabkan oleh sifat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang lebih bersifat administratif dan pendukung, yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Tugas dan fungsi legislatif DPRD, namun tidak selalu dapat diukur dengan IKK yang berlaku untuk perangkat daerah lainnya.

Walaupun tidak ada IKK yang ditetapkan, kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang akan tetap dievaluasi berdasarkan efektivitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kinerja DPRD. Pencapaian kinerja akan difokuskan pada kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Singkawang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekretariat DPRD dapat terus berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, meskipun tanpa adanya IKK yang terukur dalam konteks yang lebih umum.

# BAB V

## PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini disusun sebagai pedoman kerja yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025–2029, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi yang terukur, akuntabel, dan transparan.

Renstra ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2025 dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekretariat DPRD, telah dirumuskan 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang kuat dan adaptif dalam menghadapi dinamika kebutuhan layanan legislatif, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara berkelanjutan.

Berikut adalah kesimpulan yang lebih rinci berdasarkan masing-masing poin dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD secara optimal. Tujuan ini sejalan dengan misi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang yang berfokus pada pencapaian pelayanan publik berbasis teknologi. Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi garda depan dalam membantu tugas DPRD, baik dalam bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Dengan demikian, tujuan ini menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan.
2. Sasaran utama dari Renstra ini adalah peningkatan kualitas layanan administrasi yang diberikan kepada anggota DPRD, serta memastikan dukungan yang maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk indikator yang jelas dan terukur, seperti tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Penetapan indikator ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan DPRD, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja DPRD dapat meningkat.

3. Strategi yang diusung dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang meliputi beberapa langkah penting untuk meningkatkan kinerja Sekretariat secara keseluruhan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi digital juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses kerja administratif. Peningkatan sinergi antar unit kerja dan kolaborasi dengan instansi eksternal juga diutamakan untuk memperkuat dukungan terhadap tugas DPRD, agar Sekretariat DPRD dapat memberikan layanan yang lebih optimal.
4. Evaluasi kebijakan secara berkala menjadi bagian integral dari pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk melakukan penajaman kebijakan jika diperlukan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, Sekretariat DPRD dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan menemukan solusi yang tepat. Penajaman kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil relevan dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan Renstra Sekretariat DPRD. Selama periode Renstra 2025-2029, diharapkan ada peningkatan signifikan dalam serapan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD. Pengelolaan anggaran yang optimal akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung kegiatan dan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga akan meningkatkan akuntabilitas Sekretariat DPRD terhadap publik dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja DPRD dan Sekretariat.

Dengan implementasi yang baik dari setiap poin tersebut, diharapkan Sekretariat DPRD Kota Singkawang dapat menjadi lembaga yang lebih profesional, efisien, dan responsif, serta mampu memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis Renstra ini dilakukan di bawah arahan dan pengendalian langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Singkawang. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris DPRD dibantu oleh para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Sub Koordinator, serta seluruh pelaksana fungsional sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Kaidah pelaksanaan Renstra juga mengacu pada ketentuan kelembagaan yang diatur dalam:

- **Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021**, tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang; dan
- **Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021**, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar penjabaran tugas dan fungsi kelembagaan serta pembagian tanggung jawab pelaksanaan yang menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini.

## 3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Sebagai bentuk pengendalian dan penjaminan mutu atas pelaksanaan Renstra, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, yang menekankan pada keterukuran hasil dan pencapaian output serta outcome sesuai target yang telah ditetapkan. Analisis terhadap indikator kinerja menjadi alat ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan strategi dan arah kebijakan, serta dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan DPRD dan masyarakat.

Lebih jauh, Renstra ini juga mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui keterlibatan dalam pengawasan, pemberian aspirasi, dan dukungan terhadap proses legislasi yang inklusif. Hal ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, guna memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Sekretariat DPRD Kota Singkawang diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan yang optimal kepada

DPRD dan masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berkeadilan sosial.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disusun sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahun kedepan (2025 – 2029).



Singkawang, Agustus 2025  
Plt. Sekretaris DPRD Kota Singkawang

**HENDRA, SH**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690816 199212 1 001

**SEKRETARIAT DPRD**  
KOTA SINGKAWANG  
2025